SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: p-ISSN 2615-3009
Economic, Accounting, Management and Business e-ISSN 2621-3389
Vol. 8, No. 3, July 2025

# Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah

**Tika Saniya[1], Nina Yulianasari[2], Helmi Herawati[3]**
Universitas Prof. Dr. Hazairin SH Bengkulu, Indonesia
tikasaniya139@gmail.com[1], ninayulianasari26@gmail.com[2],
helmiherawati77@gmail.com[3]

**Submitted**: 15th April 2025 | **Edited**: 27th June 2025 | **Issued**: 01st July 2025

**Cited on**: Saniya, T., Yulianasari, N., & Herawati, H. (2025). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business, 8*(3), 828-837.

## ABSTRACT

Public sector organizations are expected to uphold high standards of transparency, accountability, and good governance. In Indonesia, government institutions are required to implement accrual-based accounting systems and internal controls to ensure the quality and reliability of financial reporting. However, questions remain regarding how effectively these elements contribute to performance accountability at the regional level. This study aimed to determine whether the application of accrual-based Government Accounting Standards (SAP), internal control systems (SPI), and the quality of financial reports affect performance accountability at the Inspectorate of Central Bengkulu Regency, both partially and simultaneously. The research employed a quantitative approach, collecting data through questionnaires distributed to 30 employees who met purposive sampling criteria. Responses were measured using a Likert scale. Data analysis was conducted using multiple linear regression with SPSS version 26.0. Prior to hypothesis testing, several classical assumption tests were performed, including validity and reliability tests, as well as normality, multicollinearity, and heteroscedasticity tests. The results revealed that the application of accrual-based SAP, internal control systems, and the quality of financial statements each have a significant and positive impact on performance accountability. These findings underscore the importance of implementing sound financial and administrative practices to improve transparency, efficiency, and trust in government operations, reinforcing the principles of good governance.

**Keywords:** Accrual-Based SAP, Internal Control System, Financial Report Quality, Performance Accountability, Good Governance

## PENDAHULUAN

Dalam mencapai manajemen keuangan yang baik maka perlu penguatan sistem pengendalian dan kelembagaan berdasarkan peraturan undang-undang dengan standar penyusunan laporan keuangan yang benar dan akuntabilitas. Dengan diberlakukannya pengelolaan keuangan dengan benar dapat dipastikan hal ini dapat mengubah kinerja pemerintah dalam penyajian laporan keuangan. Pencatatan keuangan yang baik atas dasar kinerja akuntabilitas dalam menginformasikan dan membuat laporan keuangan (Sari & Wahyuni, 2023).

Penerapan akuntansi berbasis akrual diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel. Adapun tujuan penggunaan basis akrual yaitu: meningkatkan efisiensi dan efektivitas (penganggaran, akuntansi dan pelaporan), meningkatkan pengendalian fiskal (manajemen aset), meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah, informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan, mereformasi sistem anggaran belanja dan transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Akuntansi berbasis akrual mengakui pendapatan dan belanja (biaya) bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan, tetapi pada saat transaksi terjadi (Ayu & Kusumawati, 2020).

Sistem pengendalian intern yang baik dapat diwujudkan salah satunya dalam keberhasilan pencapaian kinerja instansi melalui pengukuran kinerja, sehingga tindakan *monitoring* dan evaluasi kinerja secara rutin diperlukan untuk memberikan keyakinan apakah pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan perencanaan (Haryanto & Andayan, 2023:73).

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktivitas dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Sistem pengendalian intern merupakan sebuah kewajiban dari pihak manajemen yang sangat penting (Doni *et al*., 2023).

Laporan keuangan daerah pada dasarnya merupakan suatu asersi atau pernyataan dari pihak manajemen pemerintah daerah kepada pihak lain, yaitu pemangku kepentingan yang ada tentang kondisi keuangan pemerintah daerah, agar dapat menyediakan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan dapat dipenuhi dengan laporan yang disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pemeriksaan atas laporan keuangan diperlukan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Puturani, 2020).

Kualitas laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Standar Akuntansi Pemerintah, 2010) untuk kebutuhan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan merupakan suatu keharusan bagi pemerintah untuk memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Informasi laporan keuangan pemerintah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Ridzal, 2020).

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi instansi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Pusdiklatwas BPKP, 2011). Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil, bersih dan bertanggung jawab, perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi. Seluruh instansi pemerintah wajib memahami lingkup akuntabilitasnya sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dalam rangka pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Laporan kinerja instansi pemerintah dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitias kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing entitas pelaporan atau entitas akuntansi (Puturani, 2020).

Inspektorat kabupaten Bengkulu Tengah beralamat di komplek perkantoran Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah. Lokasi ini berada di pusat pemerintahan daerah yang memudahkan koordinasi dengan instansi lain serta mudah diakses oleh masyarakat sekitar. Peneliti memilih Inspektorat kabupaten Bengkulu Tengah sebagai lokasi penelitian karena Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah telah menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sejak tahun 2013 dan secara konsisten menyerahkan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selama lima tahun terakhir (2019-2023) laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Bengkulu Tengah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang menunjukkan kinerja keuangan yang baik dan sesuai standar. Selain itu, Inspektorat memiliki peran penting dalam pengelolaan anggaran pemerintah dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran, serta bertugas untuk mencegah dan menyelidiki tindakan yang melanggar aturan.

## LANDASAN TEORI

### SAP Berbasis Akrual

Menurut Sari & Wahyuni L (2023:6), Standar akuntansi dengan basis akrual merupakan akuntansi yang mengakui dan mencatat segala transaksi ketika terjadi atau saat adanya perolehan. Dapat diartikan sistem akuntansi yang satu ini berfokus dengan perhitungan sumber daya yang ekonomis pada suatu entitas, lembaga atau instansi. Kelebihan akuntansi berbasis akrual ialah dimana setiap informasi yang didapat akan lebih lengkap serta terperinci perihal aktiva dan kewajiban. Sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual dapat memenuhi atau melengkapi tujuan dari laporan keuangan yang tidak bisa digunakan oleh sistem akuntansi pemerintah yang berbasis kas. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah menyusun standar secara konseptual akuntansi berbasis akrual dapat memberikan informasi yang lebih mudah dipahami dan transparan dibandingkan dengan akuntansi kas. Akuntansi berbasis akrual mampu mendukung terlaksananya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar, nilai yang dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi tidak hanya jumlah yang telah dibayarkan, tetapi dengan memasukkan seluruh beban, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar.

### Sistem Pengendalian Intern

Menurut Haryanto & Andayan (2023:73), Sistem pengendalian intern adalah seperangkat tindakan dan kegiatan yang diintegritaskan oleh manajemen dan seluruh pegawai untuk memastikan terpenuhinya misi instansi melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, dan pengamanan aset negara dilakukan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan PP No. 60 Tahun 2008. Menurut Pitaloka (2019:20), tujuan utama pengendalian ini adalah agar pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatannya dengan baik, efisien dan sesuai prosedur, dalam hal ini pemerintah daerah dapat menginformasikan laporan keuangan pemerintah daerah, dalam memenuhi kewajiban akuntabilitas publik dan kesalahan dapat harus segera

dideteksi dan diperbaiki. Fungsi pengendalian intern ini sendiri adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pemeriksaan efektivitas pelaksanaan kegiatan organisasi, dengan memperhatikan aspek efektivitas biaya, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan pengembangan teknologi dan implementasikan secara kompresif. Pengendalian intern dapat dicapai oleh suatu organisasi, dalam hal ini pemerintah daerah dengan menggunakan komponen- komponen yang membentuk sistem pengendalian intern dalam seluruh kegiatan usahanya.

**Kualitas Laporan Keuangan**

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 yang menyatakan kualitas laporan keuangan merupakan karakteristik kualitatif yang memungkinkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat membantu pengguna dalam mengambil keputusan. Menurut standar akuntansi nasional, relevansi, keandalan, keterbandingan, dan pemahaman merupakan faktor fundamental yang menentukan kualitas pelaporan keuangan entitas pemerintah. Relevan artinya (1) mempunyai kemampuan untuk membuat prediksi atau membentuk ekspektasi mengenai masa depan (nilai prediktif), dan (2) memberikan umpan balik mengenai ekspektasi masa lalu sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan (nilai umpan baik), (3) disajikan sebelum kehilangan kemampuan untuk mempengaruhi keputusan (jadwal), dan (4) memuat semua informasi yang dapat mempengaruhi keputusan (representasi setia).

Menurut Fahmi (2017:28) tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan. Para pemakai laporan akan menggunakannya untuk meramalkan, membandingkan dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya. Informasi mengenai dampak keuangan yang timbul sangat berguna bagi pemakai untuk meramalkan, membandingkan dan menilai keuangan.

**Akuntabilitas Kinerja**

Menurut Doni, et al. (2023:329), akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban penyelenggaraan kegiatan publik, mampu menjelaskan dan menjawab semua pertanyaan yang berkaitan dengan seluruh keputusan dan proses yang dilakukan serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya. Akuntabilitas juga diartikan sebuah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan.

Menurut Mikoshi (2020:194), akuntabilitas kinerja salah satu kunci untuk mencapai tata kelola yang baik dalam pengelolaan sektor publik adalah akuntabilitas kinerja. Instansi secara hukum diwajibkan untuk memenuhi tanggungjawab instansinya berdasarkan layanan yang mereka berikan, sehingga tanggungjawab atas kinerja telah menjadi bagian utama dari kerangka hukum atau aturan instansi. Pemahaman mengenai akuntabilitas ini menjadi prinsip panduan bagi hampir semua reformasi sektor publik, sehingga menjaga aktor-aktor kuncinya yang terlibat tetap akuntabel dan memastikan kinerja pelayanan publik yang baik.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data primer melalui

penyebaran kuesioner kepada responden guna menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menjawab pertanyaan mengenai kondisi aktual objek penelitian berdasarkan data yang terkumpul. Penelitian dilaksanakan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah, yang merupakan lembaga pengawasan internal pemerintah daerah. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual (SAP), sistem pengendalian internal (SPI), dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja.

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang pegawai yang bekerja di Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode nonprobability sampling, tepatnya purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di bagian keuangan, pegawai yang rutin melakukan pemeriksaan keuangan, serta pegawai yang memiliki pengalaman kerja minimal satu tahun. Pemilihan kriteria ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa responden memiliki pemahaman dan pengalaman yang relevan terhadap variabel yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda untuk melihat pengaruh simultan maupun parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

## HASIL PENELITIAN

### Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu kuesioner dari masing-masing variabel dalam penelitian. Pada penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS seri 26 yang tingkat signifikan 0,05 atau 5% yang dilihat dari r hitung dari n=30, df=n-2 atau 30-2=28 maka r tabel=0,361. Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan dalam penelitian ini valid dan memiliki r hitung lebih besar dari r tabel yaitu 0, 361.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dikatakan reliabel atau handal adalah jika sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama pul. Batas nilai yang digunakan untuk mengukur reliabilitas yang diterima adalah 0,6. Hasil olah data uji reliabilitas dalam penelitian ini memiliki nilai *cronbach's alpha* diatas 0,60 yang menunjukkan bahwa seluruh pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini reliabel dan layak untuk digunakan dalam pengumpulan data selanjutnya.

### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengguna atau residual memiliki distribusi normal, model regresi yang baik memiliki distribusi data normal. Dari hasil data yang diolah menunjukkan bahwa pada uji *Kolmogorov-Smirnov* nilai signifikansinya adalah sebesar 0,200 > 0,05. Hal ini membuktikan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

### Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas nilai variabel SAP berbasis akrual memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,721 dan VIF sebesar 1,386. Variabel SPI memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,755 dan VIF sebesar 1,324. Variabel kualitas laporan keuangan memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,692 dan VIF sebesar 1,446. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel tidak terdapat masalah multikolinearitas sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini.

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini terdapat titik-titik yang menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada huruf Y dan tidak mempunyai pola yang teratur. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi maka tidak terjadi kesamaan varian dari residu satu pengamatan yang lain.

**Analisis Regresi Linear Berganda**

Hasil olah data diperoleh persamaan regresi linear berganda $Y = 6,249 + 0,378.X_1 - 0,210.X_2 + 0,434.X_3 + e$. Dengan penjelasan regresi linear berganda sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 6,249 yang menyatakan jika variabel SAP berbasis akrual, sistem pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan dianggap konstan atau sama dengan nol, maka variabel akuntabilitas kinerja adalah sebesar 6,249.
2. Nilai koefisien regresi SAP Berbasis Akrual sebesar 0,378 yang berarti setiap terjadi peningkatan variabel SAP Berbasis Akrual sebesar 1% maka Akuntabilitas Kinerja meningkat sebesar 0,378 (37,8%) atau sebaliknya setiap terjadi penurunan variabel SAP Berbasis Akrual ($X_1$) sebesar 1% maka akuntabilitas kinerja menurun sebesar 0,378 (37,8%).
3. Nilai koefisien regresi linear berganda SPI sebesar -0,210 yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel Sistem Pengendalian Intern sebesar 1% maka akuntabilitas kinerja mengalami penurunan sebesar -0,210 (-21%) atau sebaliknya setiap terjadi penurunan variabel Sistem Pengendalian Intern ($X_2$) sebesar 1% maka akuntabilitas kinerja meningkat sebesar -0,210 (-21%).
4. Nilai koefisien Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,343 yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel Kualitas Laporan Keuangan sebesar 1% maka akuntabilitas kinerja meningkat sebesar 0,343 (34,3%) atau sebaliknya setiap terjadi penurunan variabel kualitas laporan keuangan sebesar 1% maka akuntabilitas kinerja menurun sebesar 0,343 (34,3%).

Hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa ketiga variabel independent SAP berbasis akrual, sistem pengendalian intern (SPI), dan kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja, meskipun arah pengaruhnya berbeda. Koefisien konstanta sebesar 6,249 menunjukkan bahwa jika tidak ada pengaruh dari ketiga variabel independen, nilai akuntabilitas kinerja tetap berada pada tingkat yang cukup tinggi. Ini mencerminkan adanya faktor lain di luar model yang juga berkontribusi terhadap akuntabilitas, sebagaimana dijelaskan oleh Mardiasmo (2019) bahwa akuntabilitas publik tidak hanya dipengaruhi oleh sistem dan prosedur formal, tetapi juga oleh budaya organisasi dan integritas individu dalam pemerintahan.

Variabel SAP berbasis akrual memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, dengan koefisien sebesar 0,378. Hal ini sesuai dengan teori akuntansi sektor publik yang menyatakan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik (Christiaens et al., 2015). Hasil ini juga diperkuat oleh penelitian Pratiwi dan Nurkholis (2018) yang menemukan bahwa akuntansi akrual berperan dalam penyajian laporan keuangan yang lebih informatif, sehingga membantu pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja yang lebih baik. Dengan kata lain, semakin baik penerapan SAP berbasis akrual, semakin meningkat pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Menariknya, variabel SPI menunjukkan pengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja, yaitu sebesar -0,210. Ini bisa mengindikasikan bahwa meskipun sistem pengendalian intern diterapkan, efektivitasnya belum optimal atau bahkan menimbulkan

birokrasi yang menghambat kinerja. Temuan ini bertentangan dengan teori pengendalian intern menurut COSO (2023), yang menyatakan bahwa SPI yang baik seharusnya meningkatkan efisiensi operasional dan akuntabilitas. Kualitas laporan keuangan, sebaliknya, berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0,343 terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini sejalan dengan pendapat Mahmudi (2015) bahwa laporan keuangan yang andal menjadi dasar bagi pimpinan instansi untuk mengevaluasi capaian kinerja, serta mendorong peningkatan transparansi dan tanggung jawab publik.

**Uji Parsial (Uji t)**

Hasil olah data uji t SAP Berbasis Akrual menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh SAP berbasis akrual terhadap akuntabilitas kinerja adalah 0,002 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel SAP berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Berdasarkan hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa implementasi SAP berbasis akrual berkontribusi positif dan signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan SAP Berbasis Akrual maka semakin baik juga tingkat akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah.

Hasil olah data uji t SPI menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja adalah 0,049 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern memiliki pengaruh negatif namun signifikan, yang menunjukkan adanya kendala penerapan sistem pengendalian intern atau lemahnya pemahaman pegawai Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah tentang sistem tersebut. Hal ini berarti semakin meningkatnya sistem pengendalian intern justru diikuti dengan penurunan tingkat akuntabilitas kinerja di Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah.

Hasil olah data uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja adalah 0,006 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Berdasarkan hasil uji t disimpulkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah. Artinya, laporan keuangan yang disusun secara akurat, relevan, dan tepat waktu menjadi alat utama dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran kepada publik dan pemangku kepentingan serta dapat membantu dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja. Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Inspektorat tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi administratif, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada pemangku kepentingan, seperti Bupati, DPRD, BPK, dan masyarakat.

**Uji Simultan (Uji F)**

Berdasarkan hasil olah data yang telah dilakukan oleh peneliti dapat dilihat f hitung sebesar 11,445 > 2,98 f tabel. Dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $H_4$ diterima, maka variabel SAP berbasis akrual ($X_1$), sistem pengendalian intern ($X_2$) dan kualitas laporan keuangan ($X_3$) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja (Y). Artinya, penerapan SAP berbasis akrual yang baik, sistem pengendalian yang kuat, dan laporan keuangan yang berkualitas adalah fondasi utama untuk menciptakan akuntabilitas kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan profesional.

Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah tidak hanya ditentukan oleh satu faktor tunggal, tetapi merupakan hasil dari interaksi dan kontribusi ketiga variabel tersebut. SAP berbasis akrual berperan penting dalam menyediakan informasi keuangan yang lengkap dan transparan. Sistem pengendalian intern menjaga agar seluruh proses berjalan sesuai dengan peraturan dan tujuan organisasi. Sedangkan kualitas laporan keuangan mencerminkan integritas dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan.

**Uji Koefisien Determinasi ($R^2$)**

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai Adjusted $R^2$ sebesar 0,457, yang berarti bahwa ketiga variabel independen—SAP berbasis akrual, sistem pengendalian intern (SPI), dan kualitas laporan keuangan—secara simultan mampu menjelaskan 45,7% variasi dalam akuntabilitas kinerja di Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah. Dengan kata lain, hampir setengah dari tingkat akuntabilitas kinerja dapat dijelaskan melalui kualitas sistem akuntansi, efektivitas pengendalian intern, dan penyusunan laporan keuangan yang andal. Hal ini menegaskan bahwa ketiga variabel tersebut merupakan komponen penting dalam menciptakan kinerja pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Namun, masih terdapat 54,3% variasi dalam akuntabilitas kinerja yang tidak dijelaskan oleh model ini. Persentase ini menunjukkan adanya pengaruh dari variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian, seperti budaya organisasi, kepemimpinan, kompetensi sumber daya manusia, komitmen etis, sistem reward and punishment, serta partisipasi publik. Hal ini sejalan dengan teori organisasi publik yang menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor multidimensional, baik struktural maupun non-struktural (Denhardt & Denhardt, 2023). Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, penelitian lebih lanjut sebaiknya mempertimbangkan variabel-variabel tersebut.

Temuan ini memberikan implikasi praktis bahwa meskipun penerapan SAP berbasis akrual, SPI, dan kualitas laporan keuangan penting, upaya peningkatan akuntabilitas kinerja tidak dapat hanya bergantung pada aspek teknis administratif saja. Intervensi manajerial dan penguatan kapasitas organisasi juga perlu ditingkatkan. Selain itu, hasil ini juga menjadi masukan bagi pembuat kebijakan daerah untuk lebih memperhatikan faktor-faktor lain di luar aspek keuangan yang berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas, guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja di Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem akuntansi yang mencerminkan kondisi keuangan secara lebih realistis dan transparan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Implementasi SAP berbasis akrual mendorong penyajian laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah.

Selain itu, sistem pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan juga berperan penting dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja yang lebih baik. Meskipun terdapat

dinamika dalam efektivitas pengendalian intern, secara umum peningkatan kualitas pengawasan internal dan penyusunan laporan keuangan yang andal akan memberikan kontribusi terhadap transparansi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran dan program kerja. Ketiga variabel ini, secara bersama-sama, membentuk kerangka tata kelola pemerintahan yang sehat. Implikasinya, pemerintah daerah perlu terus mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas dalam pengelolaan keuangan serta penguatan sistem pengawasan internal untuk memastikan bahwa prinsip good governance dapat diwujudkan secara konsisten dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

Adolph, R. (2016). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah*. 1–23.

Alvin. A. Arens, Randal. J. Elder, M. S. B. (2015). *Auditing Dan Jasa Assurance: Pendekatan Terintegrasi Jil. 1. Edisi Lima Belas-Jakarta. Erlangga*.

Ayu, P. C., & Kusumawati, N. P. A. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar. *Widya Akuntansi Dan Keuangan*, *2*(1), 113–126.

Biduri, S. (2018). *Akuntansi Sektor Publik. Cetakan Pertama. Sidoarjo: UMSIDA Press*.

Christiaens, J., Vanhee, C., Manes-Rossi, F., Aversano, N., & van Cauwenberge, P. (2015). The Effect of IPSAS on Reforming Governmental Financial Reporting: An International Comparison. International Review of Administrative Sciences, 81(1), 158–177.

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). (2023). Internal Control – Integrated Framework.

Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2023). The New Public Service: Serving, Not Steering. M.E. Sharpe.

Doni, R. A., Sukraini, J., Defitri, S. Y., Yeni, A., Sriyanti, E., & Nurhayati. (2023). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Organisasi*, *7*(2), 327–333.

Fahmi. (2017). *Analisis Laporan Keuangan. Bandung. Alfabeta*.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS.25. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.*

Haryanto, P., & Andayan, R. T. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pelaporan, dan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Seminar Nasional Perbanas Institute*, *3*(December 2023), 70–84.

Idrus, S. H. (2018). *Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng*. 1–25.

Ismunawan, & Septyani, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Boyolali). *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, *5*(2), 107–121

Jati, B. P. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Wahana*, *22*(1), 1–14.

Kharisma P, I., Rahayu, S., & Yudi, Y. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kota

Jambi (Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 6(2), 126–135.*

Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2019). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Maryono, M. (2018). Akuntabilitas Sekolah; Suatu Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah. Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 1(1), 29–41.

Mikoshi, M. S. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Koni Se Sumatera Barat). Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(1), 192.

Pitaloka, S. D. A. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Aksesibilitas Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

Pratiwi, N. D., & Nurkholis. (2018). The Effect of Accrual-Based Accounting Implementation on the Quality of Financial Statements and Performance Accountability in Public Sector. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 20(1), 45–58.

Pusdiklatwas. (2011). Akuntabilitas Kinerja.

Putri Andriani, Abin Suarsa, Y. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada PDAM Tritawening Kota Bandung. Semar: sain Ekonomi Manajemen & Akuntansi Riviu STIE Muhammadyah Bandung, 1 no. 3. Hal. 26.

Puturani, R. S. N. I. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja BPJS Ketenagakerjaan. Widya Akuntansi Dan Keuangan,

Rangkuti, M. H. B. (2018). Akuntabilitas Kinerja Di Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang). Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik, 8(2), 93–101.

Ratna Wijayanti Paramita, Noviansyah Rizal, R. B. sulistyan. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif. Edisi 3. WIDYA GAMA Press.

Ridzal, N. A. (2020). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kabupaten Buton. Financial: Jurnal Akuntansi, 6(1), 87–97.

Rimbani, R. M. (2017). Dampak Subsidi Kesehatan Terhadap Pengeluaran Biaya Kesehatan Keluarga Miskin Studi Kasus Pada Masyarakat Penerima Bantuan Iuran di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. 20–32.

Sari, A., & Wahyuni L, A. (2023). Analisis Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Kinerja SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara). Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 7(2), 59–66.

Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.

Swasanany, W. T., & Widyaiswara Ahli Utama. (2021). Akuntabilitas Kinerja(Agenda 3). Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator, 1–23.

Wiguna, K. Y., Syafitri, A., & Putri, R. M. (2021). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Pengadilan Agama Lubuklinggau. Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis, 2(4), 106–125.